

**PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI DESA
GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO KABUPATEN
TUBAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN
FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PENCURIAN ENERGI LISTRIK**

SKRIPSI

Oleh:

Barokatun Nuris Syahriyah

NIM. C86215011



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Barokatun Nuris Syahriyah
NIM : C86215011
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Perbandingan
Mazhab
Judul Skripsi : Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian
Energi Listrik.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 28 Maret 2019
Saya yang menyatakan.




Barokatun Nuris Syahriyah
NIM. C86215011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Barokatun Nuris Syahriyah NIM C86215011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2019

Pembimbing,




H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI, Dip.Lead.
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Barokatun Nuris Syahriyah NIM C86215011 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



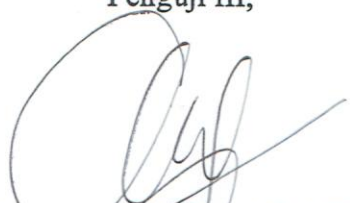
H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag.,SH.,MHI, Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji II,



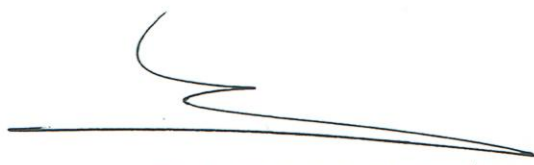
Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III,



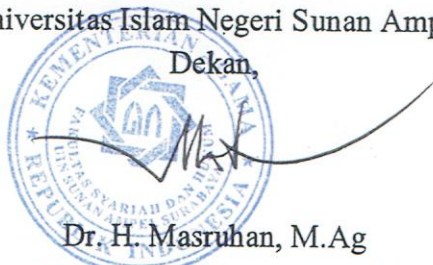
H. Muhammad Ghufro, LC, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Dr. H. Moh. Mufid, Lc.,MHI
NUP. 201603306

Surabaya, 28 Juni 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Barokatun Nuris Syah Riyah
NIM : C86215011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : nurissyah26@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI DESA GUNUNGANYAR
KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN FATWA MUI
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENCURIAN ENERGI LISTRIK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2019

Penulis

Barokatun Nuris Syahriyah

DAFTAR ISI

halaman

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN 1	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17

1. Pencurian Energi Listrik Menurut Undang-Undang	1
2. Unsur-Unsur Pencurian Dalam Undang-Undang	2
B. Tinjauan Umum Fatwa Tentang Pencurian Energi Listrik.....	2
1. Fatwa MUI Tentang Pencurian Energi Listrik.....	2
2. Sumber Hukum Fatwa MUI	2
a. Al-Qur'an.....	2
b. Hadis Rasulullah SAW	3
c. Qawaid Fiqhiyah.....	4
d. Pandangan Ulama	4

A. Gambaran Umum Desa Gununganyar Soko Tuban	43
1. <i>Locus</i> dan <i>Tempus Delicti</i>	43
2. Sejarah Gununganyar	44
3. Kondisi Demografis Desa Gununganyar	46
B. Modus Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar	50
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwenang Dalam Penanggulangan Pencurian Energi Listrik	55

Pelanggaran listrik yang terjadi sudahlah sedemikian banyak sehingga menyebabkan kerugian pada PLN sebesar 12.1 Triliun.² Ini jauh lebih besar dari laba yang diterima PLN yang hanya sebesar 3.6 Triliun pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009 di triwulan pertama bulan, sekitar 33 miliar kerugian PLN akibat pelanggaran listrik. Pelanggaran listrik pada PLN terbagi 2 yaitu pelanggan dan non pelanggan. Pelanggaran listrik pada pelanggan PLN meliputi rumah tangga, industri, bisnis/tempat hiburan, instansi pemerintahan, dan sosial. Dan modus

[illegible]

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memiliki dua ketentuan sanksi bagi pelanggaran listrik yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif diatur pada Bab XIV pada pasal 48 sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XV pada pasal 49 sampai dengan pasal 55.

- Teguran tertulis;
- Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
- Pencabutan izin usaha

Sedangkan sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggaran listrik diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 55. Selanjutnya mengenai pencurian listrik dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan

[illegible]

- a. Praktik pencurian energi listrik.
- b. Macam dan bentuk praktik pencurian energi listrik.
- c. Dampak praktik pencurian energi listrik terhadap PLN.
- d. Respon aparat dan masyarakat terhadap praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
- e. Faktor penyebab terjadinya pencurian energi listrik di Desa Gununganyar.
- f. Praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- g. Praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ditinjau dengan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencurian Energi Listrik.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini bisa terfokus dan dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Macam dan bentuk praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

1. Skripsi yang ditulis oleh Claudya Asthin L 2017, Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum” yang mana didalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang bagaimana analisa satu kasus secara mendalam dan utuh. Didalamnya menjelaskan penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian listrik dengan cara melawan hukum dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Budi Prakarsa Katapen 2009, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Perusahaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagalistrikan” yang mana di dalam karya ilmiah tersebut membahas tentang pelanggaran yang dilakukan serta bagaimana pertanggungjawaban atas sanksi yang diberikan kepada pelaku pidana korporasi terhadap pencurian energi listrik menurut Undang-Undang ketenagalistrikan.
3. Skripsi yang ditulis oleh M Razik Ilham 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum prodi Jinayah Siyasah yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan” dalam skripsi ini lebih

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan praktik pencurian energi listrik dan mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional,¹² sehingga untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka di rasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur berbagai aturan yang berhubungan dengan energi listrik yang akan dijadikan alat analisis secara spesifik mengenai Praktik Pencurian Energi Listrik.
2. Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 yang dimaksud adalah keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatur mengenai pencurian energi listrik untuk mencegah kerugian bagi PLN selaku penyedia sumber energi listrik yang nantinya akan

¹² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya), 9.

suatu metode tertentu, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi data yang dikumpulkan yaitu data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

2. Sumber data

a. Sumber primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Sumber sekunder

Sumber data yang diperoleh dari penelitian orang lain.¹⁴

Bersifat membantu sumber data primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya diantara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah internet dan pengumpulan literatur yang ada di *digital library*. Data sekunder tersebut dapat di bagi:

1.) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek

¹⁴ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 43.

Bab *Pertama*, pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, dalam bab ini membahas tentang landasan teori mengenai praktik pencurian energi listrik yang terdiri dari beberapa sub bab Pencurian : Pengertian pencurian, unsur-unsur pencurian dan bentuk-bentuk pencurian. Fatwa MUI Pencurian Energi Listrik: Pengerian Fatwa MUI, Pengertian Pencurian Energi Listrik , Sumber Hukum Fatwa MUI.

Bab *Ketiga*, dalam bab ini membahas data penelitian mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian, macam-macam bentuk pencurian energi listrik di desa tersebut, Upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam penanggulangan pencurian energi listrik.

Bab *Keempat*, bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Praktik Pencurian Energi Listrik serta dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

Bab *Kelima*, penutup. Dalam bab ini merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pasal 51 ayat 3, dapat diketahui unsur-unsur delik pencurian ialah :

- Mengenai unsur “setiap orang”, sebagian pakar hukum pidana berpendapat bahwa “setiap orang” bukan merupakan unsur melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku adalah manusia. Akan tetapi, pendapat tersebut disangkal oleh pakar lainnya dengan mengutarakan pendapat bahwa “setiap orang” tersebut benar adalah unsur, tetapi perlu diuraikan siapa manusia dan berapa orang.³ Apabila unsur setiap orang sudah terpenuhi maka perlu diperhatikan unsur selanjutnya yaitu unsur menggunakan yang bukan haknya.

Koster Henker menjabarkan tentang unsur menggunakan yang bukan haknya yaitu apabila dengan hanya mengambil barang hal tersebut belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan

³ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

Menurut Moch. Anwar suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila sesuatu perbuatan tersebut telah bertentangan dengan rumusan undang-undang.⁷ suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini bersifat melawan hukum, dapat dilihat dari segi pemakaian tenaga listrik yang bukan haknya sehingga pelaku pencurian dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pada pasal 51 ayat (3) dan perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁸

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu...*, 102.

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

B. Tinjauan Umum Fatwa MUI Tentang Pencurian Energi Listrik

Menurut Ensiklopedia Iptek Energi Listrik adalah salah satu bentuk energi yang ditimbulkan oleh gerak partikel-partikel bermuatan yang disebut elektron. listrik menjadi sumber daya hidup yang penting bagi dunia masa kini.¹⁴

¹³ Tongat, *dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan*, (Malang: UMM Press, 2008), 247.

[illegible]

Penggunaan dan pemanfaatan dalam fatwa MUI tersebut mencakup segala hal tentang pendistribusian listrik yang digunakan secara ilegal dan bukan merupakan hak miliknya. Termasuk juga membantu dengan segala bentuknya dan/atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik. Banyak akibat yang ditimbulkan dari pencurian energi listrik ini, antara lain adalah kebakaran yang bisa menyebabkan hilangnya harta dan nyawa, merusak peralatan milik PLN, selain itu juga bisa mengakibatkan padamnya aliran listrik yang merugikan masyarakat serta mengganggu suplai tegangan listrik dan menyebabkan aliran listrik tidak stabil.

dan MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik.

[illegible]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya : “Adapun Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Maidah ayat 38)¹⁸

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Islam sangat melarang tegas perbuatan mencuri bahkan memberikan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian hal ini yang di jadikan acuan MUI dalam menetapkan keharaman pencurian energi listrik.

Kata pencurian dalam bahasa arab adalah *al-sarīqah* (سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا) yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi.¹⁹ Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.²⁰

Menurut Makhrus Munajat pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang biasanya dilakukan dengan sadar serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Pencurian diartikan juga sebagai

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 11 Al-Maidah (5):38 (Jakarta:widya cahaya,2011), 73.

¹⁹ Abu Malik Kamal Bin Aş-Sayyidin şālim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 185.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 85.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

b. Hadits Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتَقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* jilid 11 An-Nisa' (4):59 (Jakarta:widya cahaya,2011), 128.

Dan juga Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang artinya :³¹

“Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya yaitu Amr bin al-Ash; Dari Rasulullah saw, sesungguhnya Rasulullah saw. Ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda, barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman *tā'zīr*. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah di letaknya di tempat penyimpanan atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya maka wajib atasnya dihukum potong tangan”.

Seseorang dapat dikatakan sebagai pencuri apabila telah dinyatakan terbukti melakukan unsur-unsur pencurian. Adapun unsur-unsur pencurian ialah sebagai berikut :

a.) Pengambilan secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik barang tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut, dan tanpa kerelakannya. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna. Jadi, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana apabila tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut. Sedangkan pengambilan harta harus memenuhi tiga syarat yang diantaranya:³²

- 1) Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya.

³¹ Hadis dalam Fatwa MUI Tentang Pencurian Energi Listrik

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 83.

3) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan

a) *Hīrz bīl* atau *hīrz bīnāfsīh*, yang artinya setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan seizin pemiliknya.

4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 84.

³⁵ Ibid, 85.

Hukum Islam mengancam keras pencurian karena hal tersebut termasuk perbuatan yang merugikan orang. Sehingga dalam hukum islam pencurian dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

- Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd* dibagi menjadi dua macam yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Auda adalah sebagai berikut :

[illegible]

c. Qawaid Fiqhiyyah

Ada 4 kaidah yang digunakan oleh MUI dalam fatwa pencurian listrik. Kaidah yang *pertama*, “*Dhārār* (bahaya) harus dihilangkan”. Kaidah ini menjelaskan bahwa perbuatan pencurian listrik adalah perbuatan yang *Dhārār* (bahaya) dan perbuatan tersebut harus dihilangkan, maksud dihilangkan adalah ditindak lanjuti apabila seseorang terbukti melakukan pencurian listrik.

Kaidah *kedua*, “menghindarkan mafsadah didahulukan atas mendatangkan maslahat”.⁴¹ Kaidah ini menjelaskan bahwa lebih baik mencegah terjadinya tindak pidana (mafsadah) dari pada harus menindak lanjuti suatu tindak pidana karena proses penindak lanjutan tersebut memakan banyak dana dan waktu yang dikeluarkan. Sehingga menurut kaidah kedua tersebut lebih baik memberi tindakan pencegahan pencurian listrik sebelum pencurian listrik itu terjadi.

⁴⁰ Hadis dalam Fatwa MUI Tentang Pencurian Energi Listrik.

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah fiqih*, (Jakarta: Pranada Husada, 2002), 79.

demikian juga kafir *hārbī*. Demikian orang asing yang memerintahkan pencurian sedang dia meyakini kebolehan atau tidak keharamannya karena barunya masuk Islam atau karena jauhnya Ulama atau karena ada uzur. Orang yang *masbuk* jika melakukan pencurian juga dipotong tangan karena ada hubungan hukum dengan sebabnya.⁴²

demikian juga kafir *hārbī*. Demikian orang asing yang memerintahkan pencurian sedang dia meyakini kebolehan atau tidak keharamannya karena barunya masuk Islam atau karena jauhnya Ulama atau karena ada uzur. Orang yang *masbuk* jika melakukan pencurian juga dipotong tangan karena ada hubungan hukum dengan sebabnya.⁴²

Menyikapi masalah tersebut, maka pemerintah Belanda berniat membentuk dukuh Gunung menjadi sebuah desa dengan pertimbangan jumlah penduduk sudah cukup untuk masa itu. Ternyata niat itu disambut baik oleh warga Gunung dan Nguruan, sehingga berubahlah dukuh Gunung menjadi desa Gunung. Tetapi warga desa yang baru itu merasa kesulitan dengan sarana jalannya, akhirnya pemerintah setempat dibantu oleh warga desa membuat jalan baru dengan tetap sebagian melewati wilayah desa Nguruan. Karena kondisi desa yang masih hutan belantara, maka mereka harus babat alas demi kelancaran pembuatan jalan utama desa. Lagi-lagi mereka harus dihadapkan pada tantangan alam dan kali ini adalah adanya sebuah gunung kecil. Dengan semangat tinggi mereka menggali tengah gunung sehingga terciptalah jalan yang berada ditengah-tengah gunung. Kemudian untuk mengabdikan moment itu maka mereka sepakat untuk menambahkan kata anyar dibelakang kata gunung pada nama desa Gunung. Kata anyar diambil dari “dalam sing anyar” atau bisa juga berarti gunung yang sudah diubah karena kini terdapat sebuah jalan

[illegible]

B. Modus Praktik Pencurian Energi Listrik Di Desa Gununganyar

Menurut Bapak Lasminto selaku warga desa Gununganyar yang melakukan praktik pencurian energi listrik. Beliau menjelaskan bahwa praktik pencurian tersebut bisa dengan mengakali kabel MCB.⁸ MCB (*Miniature Circuit Board*) adalah komponen panel listrik yang berfungsi sebagai tombol

⁸ Lasminto (Pelaku Pencurian), *wawancara*, Gununganyar, 11 Maret 2019.

Dari pemaparan bapak lasminto, dapat diketahui bahwa modus praktik pencurian energi listrik yang dilakukan beliau mengandung unsur-unsur pencurian yaitu setiap orang, menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dan secara melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 30 Tahun 2009 pada pasal 51 ayat 3. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹⁰

Unsur “setiap orang” disini adalah Bapak Lasminto sebagai orang yang melakukan praktik pencurian listrik. Sedangkan penggantian MCB yang awalnya menggunakan MCB 2A (450V) lalu diganti dengan MCB yang

¹⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

energi listrik dan beliau mengetahui hukuman akibat dari pencurian listrik tersebut.

Berbeda dengan pemaparan bapak lasminto yang melakukan pencurian listrik dengan mengakali MCB, menurut bapak Andik warga Gununganyar yang juga melakukan pencurian energi listrik. Beliau menjelaskan bahwa pencurian listrik bisa juga dilakukan dengan cara mengakali kWh meter. Modus yang digunakan bapak Andik adalah dengan menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 yang membuat fungsi kWh meter menjadi lebih lambat dari fungsi kWh meter pada umumnya sehingga pemakaian listrik yang tercatat di meteran Bapak Andik menjadi lebih sedikit dibanding dengan pemakaian normal.¹¹

Modus yang dilakukan Bapak Andik tersebut mengandung unsur pencurian listrik sesuai pasal 51 ayat (3) karena menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Listrik yang dipakai dengan cara mengakali kWh meter yang fungsinya sudah dirubah menjadi lambat sehingga mengakibatkan catatan pemakaian listrik menjadi lebih sedikit hal tersebut membuat bapak andik lebih ringan dalam pembayaran listrik.

Faktor yang mempengaruhi Bapak Andik melakukan praktik pencurian energi listrik tersebut adalah faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Tingkat perekonomian keluarga bapak andik yang rendah dan beberapa kebutuhan yang perlu di cukupi maka hal tersebut mendorong bapak andik

¹¹ Andik, (Pelaku Pencurian), *Wawancara*, Gununganyar, 11 Maret 2019.

untuk melakukan pencurian listrik. Selain itu faktor pendidikan yang rendah juga menjadi pemicu karena pendidikan yang rendah membuat bapak andik beranggapan bahwa modus mengakali kWh meter yang dilakukan beliau bukan termasuk pencurian listrik.

Dari pemaparan beberapa warga yang sudah di wawancarai oleh penulis, secara garis besar modus praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar dilakukan dengan mengakali MCB dan mengakali kWh meter. Kedua modus tersebut dilakukan guna mendapatkan pembayaran yang ringan namun tetap bisa menggunakan daya sesuai kebutuhan pemakai energi listrik. Faktor utama yang mempengaruhi pencurian listrik di desa Gununganyar adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang lemah mendorong beberapa warga untuk melakukan tindakan pencurian energi listrik. Selain faktor ekonomi ada faktor lain yaitu faktor kurangnya pengawasan dari PLN dan faktor pendidikan. Faktor kurangnya pengawasan di desa Gununganyar mengakibatkan mudahnya warga melakukan tindakan pencurian energi listrik, sedangkan faktor pendidikan yang rendah berdampak pada kondisi psikis dan tingkah laku warga. Jika tingkat kondisi pendidikan warga tinggi maka cara berpikir semakin rasional dan dalam mengambil suatu tindakan selalu dipertimbangkan terlebih dahulu, Jadi orang tersebut tidak akan melakukan praktik pencurian energi listrik.

Namun dalam kasus praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar, belum ada tindakan bagi para pelaku praktik pencurian. PLN di daerah tersebut belum melakukan tindakan pengecekan secara rutin sesuai prosedural PLN. Selain itu kurangnya pengawasan dari pihak desa pada kasus pencurian energi listrik ini mengakibatkan pencurian tersebut masih terjadi hingga kini. Pihak desa tidak memberikan respon khusus berupa penyuluhan tentang bagaimana bahaya dan kerugian akibat dari kasus pencurian energi listrik yang di lakukan oleh warganya. Pihak desa juga belum memberikan teguran atau peringatan secara tegas maupun solusi dari praktik pencurian listrik di desa Gununganyar.

Dari beberapa alasan di atas, pihak berwajib dalam hal ini polisi belum melakukan tindakan bagi pelaku praktik pencurian di desa Gununganyar Baik dari kasus pencurian melalui MCB maupun kWh meter, sehingga praktik pencurian di desa Gununganyar bisa terjadi dengan mudah.

kualitas pertanian di desa Gununganyar sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat sekitar.

Faktor kedua adalah faktor pendidikan. Selain faktor ekonomi yang menjadi pendorong untuk melakukan praktik pencurian, faktor pendidikan juga berpengaruh besar dalam kasus praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar. Dari data yang didapatkan penulis, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Gununganyar hanya mampu menyelesaikan sekolah jenjang SMA. Rendahnya kualitas pendidikan di desa Gununganyar menyebabkan kurangnya pola pandang hidup masyarakat desa Gununganyar. Seperti contoh praktik pencurian yang dilakukan oleh Bapak Andik, beliau hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SMP sehingga tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya termasuk kedalam kejahatan pencurian energi listrik yang sudah ada aturan yang dengan tegas melarang perbuatan tersebut.

Kurangnya pengawasan dari pihak desa juga membuat kedua pelaku tersebut tetap melakukan praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar sampai sekarang. Pihak desa seharusnya tidak membiarkan warganya melakukan tindakan praktik pencurian listrik. Teguran yang tegas juga harus diberikan oleh pihak desa kepada pelaku pencurian energi listrik sehingga memberikan efek jera bagi pelakunya. Selain itu pihak desa juga mempunyai kewajiban memberikan solusi berupa bantuan yang layak bagi masyarakat kurang mampu di desa Gununganyar sehingga tidak ada warga di desa Gununganyar yang melakukan praktik pencurian listrik.

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya;
3. Secara melawan hukum.

PLN selaku penyedia energi listrik membagi pelanggaran energi listrik kedalam empat golongan. Sesuai dalam putusannya Nomor :1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakain Tenaga Listrik, yaitu :

[illegible]

Dalam putusan Nomor :1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik tindakan yang dilakukan oleh bapak Lasminto termasuk kedalam pasal 13 ayat (2) huruf b yaitu “alat pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya”. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh bapak Andi diatur dalam pasal 13 ayat (3) huruf c point 5b sebagaimana yang berbunyi “mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi dengan menghubungkan singkat terminal primer dan/atau sekunder CT”.

[illegible]

Sanksi dariodus yang dilakukan oleh bapak Lasminto dan bapak Andi keduanya diatur dalam pasal 14 yang berbunyi :

(1) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi berupa :

- b. Pemutusan Sementara;
- c. Pembongkaran Rampung;
- d. Pembayaran Tagihan Susulan;
- e. Pembayaran Biaya P2TL lainnya.

Selanjutnya ketentuan sanksi pada pasal 14 point a dan b dapat dijatuhi kepada pelanggan apabila sudah memenuhi kriteria dalam pasal 16. Yaitu Pemutusan Sementara dan Pembongkaran Rampung dilakukan kepada pelanggan apabila :

1. Pemutusan Sementara dilakukan kepada Pelanggan apabila :
 - a. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadi pelanggaran pada pelanggan dan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan P2TL;
 - b. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan dugaan telah terjadi pelanggaran dan pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan I;
 - c. Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN, tetapi pelanggan mengulur waktu sehingga menghambat proses penyelesaian P2TL;

2. Pembongkaran Rampung dilakukan kepada pelanggan dan bukan pelanggan apabila :
 - a. Pelanggan yang melakukan pelanggaran yang tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa peringatan II;
 - b. Sampai dengan 2 bulan sejak pemutusan sementara, pelanggan belum melunasi Tagihan susulan sesuai SPH;

Sanksi Biaya P2TL dan Biaya Susulan dijatuhkan bagi pelanggan yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud pasal 13 Dalam putusan Nomor :1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakain Tenaga Listrik dan ditetapkan oleh Unit Pelaksana Induk setempat.

Praktik pencurian yang dilakukan oleh bapak lasminto dan bapak andi keduanya mengandung unsur kesengajaan. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. Kesengajaan di atas membedakan madus pencurian bapak lasminto sebagai kesengajaan yang bersifat kemungkinan atau disebut *dolus malus* karena bapak lasminto mengetahui akibat dari tindakanya melakukan pencurian energi listrik dan kesengajaan yang dilakukan oleh bapak andi adalah kesengajaan yang bersifat kemungkinan atau *dolus eventualis* karena bapak andi tidak mengetahui akibat dari pencurian energi listrik yang dilakukannya.

2. Analisis Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar

Praktik penggunaan/pemanfaatan energi listrik baik dengan cara mengakali MCB maupun dengan cara mempengaruhi kWh meteran di desa Gununganyar ini termasuk dalam pencurian energi listrik. Fatwa MUI menegaskan keharaman pencurian energi listrik. dalam ketentuan umum fatwa MUI menjelaskan yang dimaksud dengan pencurian energi listrik adalah segala penggunaan maupun pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi-sembunyi baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lainnya yang ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Penggunaan dan pemanfaatan dalam fatwa MUI yang dimaksud mencakup segala hal tentang pendistribusian listrik yang digunakan secara ilegal dan bukan merupakan hak miliknya. Termasuk juga membantu dengan segala bentuknya dan/atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik.

Sejak awal Islam melarang umatnya untuk melakukan perbuatan mencuri. Hal tersebut dapat dilihat dari Firman Allah SWT yang menegaskan larangan mencuri dengan menjelaskan hukumannya, antara lain:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya : “Adapun Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari

³ Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik pada ketentuan umum.

Selanjutnya dalam poin 2 MUI menjelaskan bahwa “membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya haram.” Dari pernyataan MUI pada poin 2 tersebut, seseorang tidak boleh membantu dan membiarkan praktik pencurian energi listrik. masyarakat diminta harus turut serta untuk menanggulangi praktik pencurian energi listrik yang marak terjadi.

Poin 3 fatwa MUI menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik”. Sesuai ketiga poin dalam ketentuan hukum diatas bahwa tindakan yang dilakukan oleh bapak Lasminto dan bapak Andi merupakan perbuatan yang hukumnya haram dan MUI melarang tegas perbuatan tersebut untuk dilakukan.

Menurut penulis dari ketiga point ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh MUI, tidak ada satupun penjelasan tentang bagaimana hukum bagi seseorang yang mencuri karena faktor ekonomi atau hukum tentang seseorang yang tidak mengetahui bahwa tindakannya tersebut merupakan tindakan pencurian energi listrik. Sebagaimana tindakan yang telah dilakukan oleh bapak Andik, beliau tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan pencurian energi listrik yang sudah diatur dalam fatwa MUI. Selain faktor pendidikan yang melatar belakangi tindakan pencurian seperti bapak Andik, faktor ekonomi yang rendah juga merupakan salah satu yang menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan praktik pencurian energi listrik.

PENUTUP

Dari keseluruhan pembahasan yang sudah penulis paparkan dalam bab pertama sampai bab empat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 70

- Narbuko Cholid, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardhawi Yusuf, 1997, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Qirom A. Samsudin M dan Sumaryo, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.
- Rahman Abd al Jazri, 2002, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Beirut: Dar al Fikr, juz 4.
- Rifai Ahmad, 2014, *Mengatasi Listrik di Rumah*, Bandung: Gema Buku Nusantara.
- Sabiq Sayyid, 1993, *Fikih Sunnah*, (Moh. Nabhan Husein), Jilid IV, Bandung, PT. Al-Ma'arif.
- Setyo Budi, 2014, *Konsleting Listrik penyebab kebakaran pada rumah tinggal atau gedung*, Journal.unnes.ac.id.
- Sony A, S Sulisty, I W Mustika, 2016, *Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik Memanfaatkan Perangkat WSN*, Journal.unnes.ac.id.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tongat, 2008, *dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan*, Malang: UMM Press.
- Wāhbāh āz Zūhāili, 1989, *āl Fiqh āl Islām wā Adillātūhū*, Suriah: Dar al Fikr, 1989, Cet.ke 3, juz 7.
- Wardi Ahmad Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Lentera abadi, 2007, *Ensiklopedia Iptek : Ensiklopedia Sains Untuk Pelajar dan Umum*, Jakarta: Lentera Abadi.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kementrian Agama RI, 2011, *Al-Quran dan Tafsirnya jilid 11 Al-Maidah (5):38* Jakarta:widya cahaya

